

## **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA DARING MENGENAI ISU REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (ANALISIS FRAMING TERHADAP CNN INDONESIA.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID EDISI SEPTEMBER 2019)**

**GIBRAN, ABD. HALIK, ANDI MUHAMMAD FADLI**

Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Email: ecogibran@gmail.com; kacomandar@yahoo.co.id;

andimuhfadli75@gmail.com

### **Abstract:**

*The urgency of this research problem is how the online media CNN Indonesia.com and Republika.co.id frame the news on the issue of the revision of the Corruption Eradication Commission Law using the Robert N. Entman framing analysis tool. The results show CNN Indonesia.com framing the revision issue. The KPK Law is a movement to reject the government's attitude and see the KPK as the injured victim, while Republika.co.id frames this as an attempt by the Indonesian Parliament to strengthen the KPK not to weaken the KPK. CNN Indonesia.com places those who oppose the revision of the KPK Law more dominant than those who support the revision of the KPK Law. Meanwhile, Republika.co.id only places a chronological explanation regarding the attitude of the government and the DPR RI to reject the accusation that the DPR RI wants to undermine the KPK.*

**Keywords:** Framing, DPR RI, Revisi UU KPK

### **PENDAHULUAN**

Wacana tentang pengajuan revisi undang-undang KPK kembali menjadi isu panas yang masif diberitakan oleh berbagai instansi media, baik melalui media mainstream dan media baru. CNN Indonesia dan Republika merupakan media daring yang masif memberitakan isu revisi UU KPK, terbukti dari berita yang dimuat oleh masing-masing pihak. CNN Indonesia dengan judul "Revisi UU KPK dan Taruhan Besar di Tangan Jokowi" berikut dengan teks beritanya.

Republika dengan judul "Pengamat: Revisi UU KPK Picu Konflik Kepentingan" edisi September 2019. Isi berita yang dikemas mengenai kekhawatiran akan munculnya konflik kepentingan yang membuat kinerja KPK tersendat karena adanya intervensi dari luar lembaga.

Pemberitaan ini mengelompokkan publik menjadi dua kubu dikarenakan adanya pandangan pro dan kontra mengenai wacana revisi ini, karena perencanaan revisi ini dianggap sangat mulus. Partai politik seolah-olah kompak dan bersatu tidak ada partai politik yang bertindak

sebagai oposisi dalam tajuk revisi tersebut.

Media massa pada dasarnya adalah media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak: wartawan, sumber berita, dan khalayak. Pesan yang disampaikan media massa sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat, oleh karena itu media massa dituntut untuk bisa memberikan informasi yang baik serta memahami betul isi pesan yang disampaikan. Media massa yang baik seharusnya menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial (social control) baik pada perilaku masyarakat dan pemerintah. Kusumaningrat (2016).

Penyebaran informasi yang mengalami pergeseran nilai hadir dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan hadirnya media daring. Media daring sebagai salah satu alat untuk menyebarkan informasi memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik. Pembentukan opini publik ini idealnya terjadi secara natural terhadap suatu fenomena atau topik yang menjadi isi berita atau headline berita di media daring.

Jurnalisme daring selalu menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektivitas berita hanya untuk mengejar keinstanan. Secara riil realitas yang terjadi adalah media memiliki kekuatan untuk memilih, memilah isu apa yang

dianggap penting dan akan dijadikan sebagai realitas kepada publik agar publik juga ikut menganggap suatu isu penting. Jadi masyarakat memang dapat memilih berita sesuai dengan minatnya namun kembali lagi, media mengarahkan dan memilih isu penting itu. Morissan (2015)

Fenomena ini terjadi karena dalam prakteknya media cenderung memiliki kepentingan dan dipengaruhi beberapa faktor baik internal dan eksternal.

Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Althusser dan Gramsci mereka sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga secara implisit terdapat kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya Sobur (2018).

Hal ini memicu terjadinya gerakan dinamis oleh media dikarenakan adanya kebutuhan kepentingan dan munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi pada media disebabkan oleh relasi antara dua pihak, yakni penguasa dan pengusaha. Media yang berafiliasi atau dimiliki oleh pengusaha atau pejabat tertentu pasti memiliki konflik kepentingan, yakni apakah akan berpihak ke publik atau sebaliknya berpihak pada penguasa/pengusaha yang notabene sebagai pemilik. Kenyataan inilah yang menyebabkan

bias berita di media massa adalah sesuatu yang sulit dihindari.

Pendekatan analisis framing memandang wacana berita sebagai semacam arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dan pokok persoalan wacana. Eriyanto (2018).

Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Media massa dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Kalangan pemerintah, media massa, aktivis sosial, dan pihak yang berkepentingan saling berpacu menggunakan media massa untuk menonjolkan klaim, konstruksi sosial, dan definisi masing-masing tentang peristiwa atau masalah.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan analisis teks media yaitu framing, dengan menggunakan paradigma konstruksionis sebagai acuan memahami fenomena, paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Konsentrasi pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi dibentuk. Eriyanto (2018)

Metode analisis yang masuk dalam kategori konstruksionis ini

adalah metode analisis framing Robert N. Entman dengan metode penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka. Taylor dan Bogdan menjelaskan metodologi kualitatif merupakan prosedural penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku manusia yang diamati. Ardial (2015).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Spesifikasi Berita CNN Indonesia dan Republika tentang Isu Revisi UU KPK**

Berdasarkan hasil pencarian melalui pengumpulan item berita CNN Indonesia

Republika, peneliti mengumpulkan item berita yang membahas tentang Revisi UU KPK. Dalam pemaparan penyajiannya analisis berita akan diurutkan sesuai dengan waktu dimuatnya berita pada masing-masing waktu.

Jumlah berita yang berhasil dikumpulkan dari kedua media sebanyak 12 berita, dari 12 jumlah berita yang dikumpulkan, peneliti hanya memilih berita yang masuk ke dalam tagar atau kanal khusus revisi UU KPK yang dimuat oleh CNN Indonesia dan Republika. Dari item berita yang berjumlah 12 tersebut, hanya ada enam berita yang menurut peneliti telah menggambarkan bagaimana kedua media daring yaitu CNN Indonesia dan Republika mbingkai isu tentang revisi UU KPK.

Berangkat dari empat komponen framing Robert N. Entman, peneliti

akan menganalisis item berita yang terpilih dari hasil reduksi item yang telah dilakukan, berikut adalah sampel item berita yang dipilih peneliti sebagai bahan analisis:

1. Berita yang dimuat CNN Indonesia

a. Edisi : Jumat, 06 September 2019

Media : CNNIndonesia.com

Judul : Ribuan Orang Tekan Petisi Desak Jokowi Tolak Revisi UU KPK

b. Edisi : Senin, 09 September 2019

Media : CNNIndonesia.com

Judul : Revisi UU Amputasi KPK, Ramai-ramai Akademisi Tolak RUU

c. Edisi : Rabu, 11 September 2019

Media : CNNIndonesia.com

Judul : Waketum Gerindra Sindir Revisi UU KPK untuk Permudah Perampok

2. Berita yang dimuat Republika

a. Edisi : Jumat, 06 September 2019

Media : Republika.co.id

Judul : Revisi UU KPK Diusulkan Fraksi Parpol Pendukung Jokowi

b. Edisi : Senin, 09 September 2019

Media : Republika.co.id

Judul : DPR Tegaskan tak Ragu Lanjutkan Pembahasan Revisi UU KPK

c. Edisi : Rabu, 11 September 2019

Media : Republika.co.id

Judul : Sinyal Jokowi akan Terbitkan Revisi UU KPK

Perbandingan Frame Media Daring CNN Indonesia dan Republika

CNN Indonesia dan Republika dalam mengemas berita memiliki cara pandang sendiri dalam memaknai suatu realitas, karena dalam penyusunan berita pembuat teks menentukan dan memilah informasi yang dianggapnya penting meskipun CNN Indonesia dan Republika disuguhkan isu yang sama tapi kedua media ini cenderung mempunyai skala prioritas masing-masing untuk menampilkan hal yang ingin disampaikan kepada pembacanya.

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks dalam hal ini pihak media. Kata penonjolan itu dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak.

Penyusunan item berita pada media daring CNN Indonesia dan Republika dengan menggunakan analisis perangkat framing milik Robert N. Entman menunjukkan bagaimana isu yang sama bisa dimaknai dan didefinisikan secara berbeda.

Pendefinisian yang berbeda tersebut membawa perubahan terhadap perisitwa secara total. Pada item berita pertama CNN Indonesia dan Republika merilis berita pada hari Jumat 06 September 2019, berita dengan frame headline yang berbeda.

Dari hasil temuan peneliti yang menggunakan perangkat framing Entman, peneliti menemukan adanya

persamaan dan perbedaan sudut pandang antara CNN Indonesia dan Republika pada isu pemberitaan revisi UU KPK. Segi persamaan yang dimiliki kedua media ini adalah masing-masing media memulai beritanya dengan mencamtumkan Presiden Joko Widodo pada paragraf pertama berita.

Berdasarkan interpretasi peneliti, kedua media tersebut ingin menarik perhatian pembaca dengan menyematkan nama besar Presiden Joko Widodo orang nomor satu di Indonesia dengan disebutkannya nama Presiden akan membuat pembaca merasa berita tersebut adalah sesuatu yang perlu dan penting untuk diketahui lebih lanjut, CNN Indonesia menggambarkan Presiden Jokowi yang sedang didesak untuk menolak revisi UU KPK sedangkan Republika menjelaskan hal yang kontras dengan menyebut fraksi pendukung Jokowi yang mengusung dibahasnya kembali revisi UU KPK.

Persamaan lainnya yaitu kedua media menganggap diagnose cause (penyebab masalah) pada isu ini adalah para anggota DPR RI sebagai inisiator pembahasan kembali revisi UU KPK namun dalam menonjolkan aspek tertentu seperti menyoroti siapa dalang isu ini CNN Indonesia tampil lebih berani untuk memberi beberapa argumen bahwa biang kerok isu ini memang berasal dari anggota DPR RI, CNN Indonesia menampilkan pihak yang kontra dalam beritanya beserta dengan argumen sinis terhadap keputusan DPR RI dan pemerintah yang dianggap keliru dan melemahkan KPK. Sedangkan Republika sebaliknya tidak

terlalu memperlihatkan atau menekan pihak DPR RI sebagai pusat masalah, namun lebih menerangkan kronologis mengapa revisi UU KPK bisa dibahas dan diwacanakan kembali.

Di sisi lain, perbedaan pengemasan berita antara CNN Indonesia dengan Republika terletak pada pemilihan judul berita, CNN Indonesia cenderung menggunakan judul berita yang selalu mengaungkan gerakan penolakan sama seperti item berita kedua CNN Indonesia juga memilih berita dengan kata kunci Penolakan RUU KPK. Terlihat jelas CNN Indonesia mencoba menyampaikan aksi ini sebagai hal yang mendukung rakyat dan menyalahkan pemerintah dan DPR RI karena merencanakan revisi UU KPK.

Sementara itu Republika dalam mengemas judul berita lebih mencari aman, meski secara tersirat Republika ingin menampilkan sikap DPR RI yang cenderung gegabah dan buru-buru dalam mengambil sikap terutama dalam pembahasan revisi UU KPK ini. Terbukti dengan judul item berita pertama dan kedua yang sama-sama menampilkan bahwa DPR RI yang mengusung dibahasnya kembali RUU KPK dan ketidakraguan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi ini.

Pada perangkat framing ketiga make moral judgement (membuat keputusan moral) argumentasi yang menguatkan dipilih dan ditempatkan agar menonjol oleh kedua media. Praktiknya media memiliki cara pandang tersendiri dalam menanggapi isu revisi UU KPK hal ini dikarenakan karena realitas yang dipahami oleh

kedua media tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda pula.

Terdapat satu hal yang terus dipertahankan oleh CNN Indonesia secara konsisten pada ketiga berita yang dimuat, CNN Indonesia selalu berupaya mempertahankan frame wacana revisi UU KPK adalah suatu kebijakan yang sangat merugikan dan melemahkan KPK hal ini memunculkan anggapan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Berbeda dengan Republika yang berupaya mempertahankan frame mengenai keputusan pemerintah yang ingin memperbaiki kualitas dari KPK bukan melemahkan KPK.

Argumentasi ini diseleksi hanya dari pihak tertentu tanpa memperhitungkan unsur kelayakan berita yaitu prinsip keberimbangan atau cover both side. Ketidaknetralan kedua media secara eksplisit diperlihatkan dalam tiap item berita. Pihak CNN Indonesia tidak memberikan ruang terhadap anggota DPR RI untuk menjelaskan apa sebenarnya tujuan dan visi pemerintah dan DPR RI membahas kembali perihal revisi UU KPK CNN Indonesia hanya menampilkan argumen yang berasal dari pihak kontra seperti anggota KPK yang merasa menjadi korban akibat dibahasnya kembali revisi UU KPK.

Sedangkan Republika memberikan ruang lebih kepada DPR RI dalam menjelaskan dan menepis tuduhan yang ditujukan pihak kontra mengenai revisi UU KPK sedangkan pihak kontra seperti anggota KPK hanya diberikan sedikit ruang. Bagian pendefinisian masalah CNN Indonesia

menanggapi aksi petisi ini sebagai gerakan penolakan revisi UU KPK atau pihak kontra terhadap pemerintah oleh karena itu keputusan moral yang diusung CNN Indonesia adalah menerangkan jalannya revisi yang dilakukan tertutup dan diam-diam dapat berakibat cacat hukum. Republika kembali menerangkan sikap pemerintah yang mencoba menepis tuduhan jika revisi ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasilnya, pada perangkat framing Entman yang keempat treatment recommendation (menekankan penyelesaian) yang ditawarkan kedua media juga berbeda. CNN Indonesia berharap campur tangan Jokowi sebagai pilar eksekutif dalam demokrasi Indonesia, sedangkan Republika sendiri berharap revisi UU KPK dilakukan dengan terbuka agar dapat menampung masyarakat termasuk KPK itu sendiri.

Ciri khas yang menonjol dalam pemberitaan CNN Indonesia adalah memosisikan aktor yang kontra dengan jatah yang lebih dominan sebagai pihak korban sedangkan dari pihak yang pro akan revisi ini hanya diberi penjelasan mengenai narasi sinis dengan konotasi negatif seperti DPR yang melemahkan KPK dan melucuti kewenangan KPK. Kebalikan dari Republika sendiri yang menempatkan pemerintah dan DPR RI untuk menerangkan dan membenarkan perihal tindakan mereka tersebut bukan untuk melemahkan namun untuk memberi pengawasan dan meningkatkan kinerja KPK.

Kekhasan ini senada dengan penjelasan pada bagian make moral judgement mengenai unsur kelayakan berita salah satunya adalah prinsip keberimbangan atau cover both side. Temuan ini menunjukkan media dalam praktik yang sesungguhnya tidak lagi mengedepankan kode etik jurnalistik karena disebabkan pergeseran nilai media dari mengedepankan berita aktual beralih menjadi berita instan untuk memenuhi kebutuhan khalayak.

Temuan peneliti menggunakan teori framing dari Robert N. Entman, framing memahami wacana berita sebagai arena pertarungan simbolik antara pemangku kepentingan dengan subjek persoalan wacana. Eriyanto (2018) Masing-masing pihak menghadirkan cara pandang untuk memaknai suatu masalah agar dapat diterima oleh publik.

Media massa dipandang sebagai wadah pertemuan pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Kalangan media massa, aktivis sosial, pemerintah dan pihak yang memiliki kepentingan saling berlomba dan bersaing menggunakan media massa untuk menonjolkan klaim, konstruksi sosial, dan definisi masing-masing tentang peristiwa atau masalah.

Frame dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak ia menunjukkan identitas para aktor atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Hal ini sejalan dengan pengemasan berita CNN Indonesia dan Republika, CNN Indonesia dan Republika juga menonjolkan aspek tertentu untuk

menonjolkan klaim sendiri mengenai pandangan media dan keberpihakan masing-masing media.

Aktor dalam kedua media dipilih sesuai dengan kriteria masing-masing media untuk menggambarkan aspek dari realitas yang ingin tonjolkan senada dengan Konsep framing Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.

Berkaitan dengan isu revisi UU KPK kedua media berbeda pandangan dalam mengerucutkan masalah yang ingin ditampilkan CNN Indonesia yang mengutip argumen dari pihak kontra terhadap revisi UU KPK dengan pengemasan berita yang menampilkan pemerintahan yang tidak beres dan bertujuan melemahkan KPK. Republika yang sebaliknya mengalokasikan informasi dan argumen lebih cenderung berada di pihak pemerintah DPR RI yang menjelaskan niat baik pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja KPK lewat revisi UU KPK.

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/ dianggap penting oleh pembuat teks. Penonjolan itu sendiri dapat diartikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Karena informasi yang menonjol kemungkinan lebih mudah diingat oleh



khalayak dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Eriyanto (2018)

Berdasarkan pembingkai model framing Entman tentang pemberitaan revisi UU KPK di CNN Indonesia.com dan Republika.co.id teks yang disajikan memiliki ciri khas masing-masing mulai dari penentuan narasumber beserta narasi yang ingin ditonjolkan. Peristiwa ini menjadi muatan yang menarik ketika sampai pada pembaca dan beranggapan teks yang disuguhkan oleh kedua media tersebut adalah sesuatu yang benar adanya tanpa mengalami konstruksi realitas di dalamnya.

Bagi pemikiran konstruksionis memandang media, wartawan dan berita dengan perspektifnya sendiri. Media massa semakin banyak digandrungi dalam meningkatkan peran sebagai institusi penting bagi masyarakat. Hal ini sejalan dalam proses konstruksi sosial yang dibahas Berger dan Luckmann, media diposisikan sebagai variabel penting dalam tahap konstruksi sosial.

Merujuk pada pendekatan konstruksionis, pemberitaan media merupakan tahapan konstruksi realitas sosial, media menggambarkan sesuai dengan realitas tersaji dan kemudian dibentuk dari realitas objektif yang ada dalam dirinya sendiri. Proses tersebut diawali dengan eksternalisasi, yaitu proses bagaimana wartawan CNN Indonesia.com dan Republika.co.id melalui penyesuaian diri terhadap realitas pemberitaan kemudian proses tersebut akan memengaruhi objektivasi wartawan dalam menyusun berita.

Sehingga media mampu memperjelas dan menitikberatkan pembahasan konflik atau sebaliknya, media bisa mengonstruksi realitas namun bisa juga realitas itu berubah menjadi hiperealitas, yaitu menggiring orang mempercayai sebuah cerita sebagai kebenaran meski kenyataannya hanya dramatisasi.

Mengenai pemberitaan isu revisi UU KPK yang dikemas oleh CNN Indonesia.com cenderung memihak kepada pihak korban atau yang menentang revisi UU KPK sedangkan Republika.co.id cenderung berpihak pada pemerintah. Pemberitaan CNN Indonesia.com dan Republika.co.id ini tercipta melalui proses konstruksi dan menggunakan sudut pandang tertentu. Peneliti menguraikan temuan terkait proses konstruksi yang dilakukan CNN Indonesia.com dan Republika.co.id terkait isu revisi UU KPK.

Tahap menyiapkan materi konstruksi, penghimpunan bahan berita oleh CNN Indonesia.com dan Republika.co.id mengacu pada unsur kelayakan berita seperti kebaruan, kedekatan dengan masyarakat, dan lainnya. Biasanya fenomena yang ada di masyarakat itu ditangkap oleh wartawan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada editor yang kemudian akan membentuk susunan kalimat untuk dikonsumsi masyarakat. Materi konstruksi tidak hanya berasal dari wartawan yang mencari fenomena, tetapi materi konstruksi juga biasa diperoleh dari media lainnya dan kemudai media tersebut melakukan verifikasi kepada narasumber di berita, hal ini yang dilakukan CNN Indonesia



dan Republika.co.id dalam menyiapkan materi konstruksi dalam pemberitaan mengenai isu revisi UU KPK.

Tahap sebaran konstruksi, media daring adalah media yang cenderung banyak dipakai oleh masyarakat dalam mencari informasi aktual. Penyebabnya media daring memiliki kecepatan dalam membagi item berita yang sudah dibuat. Khusus pada tahap ini, media dapat memengaruhi pandangan masyarakat sesuai dengan berita yang dikemas oleh CNN Indonesia.com dan Republika.co.id. Akan tetapi tidak semua kalangan dapat dipengaruhi oleh media. Misalnya khalayak yang memiliki latar belakang pelajar dan mahasiswa cenderung tidak sependapat mengenai wacana revisi UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Tahap pembentukan konstruksi realitas, terdapat perbedaan antara CNN Indonesia.com dan Republika.co.id. CNN Indonesia.com mengemas isu revisi UU KPK sebagai gerakan penolakan terhadap sikap pemerintah dan DPR RI. Sedangkan Republika.co.id mengemas hal tersebut sebagai upaya DPR RI untuk menguatkan KPK bukan untuk melemahkan KPK. Saling berbeda cara pandang dan pada bagian ini kita dapat mengidentifikasi keberpihakan media apakah cenderung mendukung penguasa atau pemerintah atau berpihak pada rakyat.

Tahap konfirmasi, pada bagian ini media telah menyebarkan pemberitaan hasil kemas masing-masing dan masyarakat telah menerima berita tersebut. Hal

selanjutnya terjadi adalah timbul proses dimana masyarakat memberi reaksi mengenai apa yang telah disajikan media.

CNN Indonesia.com dan Republika.co.id masing-masing menonjolkan aspek yang berbeda sehingga masyarakat ada yang beranggapan gerakan penolakan revisi UU KPK adalah benar didukung oleh realitas argumen dari item berita yang disuguhkan CNN Indonesia.com begitu pula masyarakat yang terpengaruh atau memahami masalah revisi UU KPK mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk memperbaiki kualitas dari pihak KPK dan efisiensi cara kerja KPK.

Pembelajaran yang dapat kita petik dari framing media daring CNN Indonesia.com dan Republika.co.id adalah manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya.

Setiap individu diharapkan mampu menyaring informasi yang tersebar luas di sosial media sekaligus dituntut untuk tidak mudah terkecoh dengan apa yang media massa suguhkan. Media massa dituntut untuk mengedepankan prinsip dasar kode etik jurnalistik yang mengedepankan kejujuran dengan mengemas berita apa adanya. Tidak hanya berpihak kepada penguasa namun betul-betul sebagai wadah untuk menyalurkan informasi dan mengawasi penguasa.

## **PENUTUP/KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap framing isu revisi UU KPK pada media daring CNN Indonesia dan Republika dengan menggunakan model perangkat framing Robert N. Entman, disimpulkan bahwa framing dari kedua media tersebut adalah:

1. CNN Indonesia membingkai isu revisi UU KPK sebagai gerakan penolakan terhadap sikap Pemerintah dan DPR RI. Sedangkan Republika membingkai hal tersebut sebagai upaya DPR RI untuk menguatkan KPK bukan untuk melemahkan KPK.

2. CNN Indonesia menempatkan pihak yang kontra terhadap revisi UU KPK lebih dominan dibanding pihak yang pro dengan revisi UU KPK. Sementara Republika hanya menempatkan penjelasan kronologis mengenai sikap pemerintah dan DPR RI untuk menolak tuduhan DPR RI ingin melemahkan KPK.

3. CNN Indonesia menjadikan DPR RI sebagai aktor penyebab masalah pada berita yang dimuatnya dengan menggambarkan keputusan DPR RI yang melakukan rapat secara diam-diam dan beresiko besar untuk mencederai cita-cita bangsa dalam menumpas aksi korupsi yang marak di negeri ini. Republika juga berpendapat DPR RI dan Pemerintah sebagai penyebab masalah isu ini namun Republika tidak terlalu membahas secara merinci respon dari masyarakat yang kontra akan sikap DPR RI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2015). Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2014). Sosiologi Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Bungin, B. (2015). Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2002). Al-qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mahkota Surabaya.
- Emzir. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta : Rajawali Pers.
- Eriyanto. (2018). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta : LkiS Group.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kusumaningrat, H. & Kusumaningrat, P. (2016). Jurnalistik Teori dan Praktik Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, R. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Morissan. (2013). Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Jakarta: Prenadamedia Group.

- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika
- Musman, A & Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme Dasar*. Yogyakarta: Komunika.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin. (2009). *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Poloma, M. (1999). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sobur, A. (2018). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparno, P. (2018). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Andi Sitti Maryandani. 2016. "Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar". Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Hajerimin. 2017. "Analisis Framing Media Massa (Konstruksi Berita Politik Harian Amanah tentang Abdul Aziza Qahhar Mudzakkar Jelang Pilgub Sul-Sel 2018: Studi Analisis Framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki)". Skripsi. Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Vichar Pratama Putra. 2015. "Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pidato Kenegaran Presiden Jokowi atas Kritik Media Massa di Media Online Sindonews.com dan Vivanews.co.id Edisi 2015)". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.